

EVALUASI KOMPREHANSIF MEKANISME PARTISIPASI PUBLIK DI DPRD KABUPATEN BANGKALAN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG INKLUSIF DAN AKUNTABEL

Oleh:

Triana Wati¹

Moh Ibnu Fajar²

Universitas Trunojoyo Madura

Alamat: JL. Raya Telang, Telang, Kec. Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur
(69162).

Korespondensi Penulis: Trianawati173@gmail.com, ibnu.fajar@trunojoyo.ac.id.

Abstract. *This study analyzes the effectiveness of public participation mechanisms in the Bangkalan Regional House of Representatives (DPRD Bangkalan) in realizing inclusive and accountable governance. Using an empirical approach with primary data from interviews with DPRD members and secondary data, the study finds that DPRD Bangkalan recognizes the importance of public participation. The recess period (reses) is identified as the most effective method for gathering public aspirations that are later translated into programs, while public hearings focus more on the formulation of regional regulations, albeit with limited reach. However, significant findings reveal gaps in inclusiveness and accountability. Participation from farmer groups remains low, hindered by limited access to technology and lack of information, which poses the risk of producing less relevant policies. The absence of a transparent and systematic feedback mechanism regarding the follow-up of public input also risks undermining public trust. In conclusion, DPRD Bangkalan needs to diversify its participatory methods to be more adaptive and inclusive of all community segments and develop a transparent and accountable feedback system. Recommendations include digital literacy education,*

EVALUASI KOMPREHANSIF MEKANISME PARTISIPASI PUBLIK DI DPRD KABUPATEN BANGKALAN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG INKLUSIF DAN AKUNTABEL

periodic analysis of public aspiration trends, and the publication of follow-up reports to strengthen policy accountability and relevance..

Keywords: *Public Participation, Governance, Inclusivity, Accountability, Reses, DPRD Bangkalan.*

Abstrak. Penelitian ini menganalisis efektivitas mekanisme partisipasi publik di DPRD Bangkalan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inklusif dan akuntabel. Menggunakan pendekatan empiris dengan data primer dari wawancara anggota DPRD serta data sekunder, studi ini menemukan bahwa DPRD Bangkalan memahami pentingnya partisipasi. Reses menjadi metode paling efektif untuk menyerap aspirasi yang kemudian diwujudkan dalam program, sementara *Public Hearing* fokus pada perumusan peraturan daerah meskipun jangkauannya terbatas. Namun identifikasi signifikan menunjukkan celah dalam inklusivitas dan akuntabilitas. Partisipasi kelompok petani masih rendah, terhambat oleh akses teknologi dan kurangnya informasi, berisiko menghasilkan kebijakan yang kurang relevan. Ketiadaan mekanisme umpan balik yang transparan dan sistematis mengenai tindak lanjut aspirasi juga dapat mengikis kepercayaan publik. Sebagai Kesimpulan, DPRD Bangkalan perlu diversifikasi metode partisipasi yang lebih adaptif untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat, serta mengembangkan sistem umpan balik yang transparan dan akuntabel. Rekomendasi meliputi edukasi literasi digital, analisis tren aspirasi berkala, dan publikasi laporan tindak lanjut guna memperkuat akuntabilitas dan relevansi kebijakan.

Kata Kunci: Partisipasi Publik, Tata Kelola Pemerintahan, Inklusivitas, Akuntabilitas, Reses, DPRD Bangkalan.

LATAR BELAKANG

Partisipasi publik merupakan salah satu elemen kunci dalam tata kelola pemerintahan yang baik terutama dalam konteks demokrasi. Di Indonesia, partisipasi masyarakat dalam pengambilan Keputusan publik diharapkan dapat meningkatkan legitimasi, dan akuntabilitas pemerintah. Dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

memiliki peran strategis sebagai lembaga legislatif yang mewakili suara rakyat dan menjembatani aspirasi masyarakat dengan kebijakan publik¹.

DPRD Bangkalan sebagai salah satu lembaga legislatif daerah di Jawa Timur diharapkan dapat mengimplementasikan mekanisme partisipasi publik yang efektif untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang inklusif dan akuntabel. Namun, dalam praktiknya terdapat tantangan yang dihadapi dalam mengoptimalkan partisipasi publik. Menurut penelitian oleh Sari (2022), banyak masyarakat yang kurang memahami hak dan kewajiban mereka dalam proses partisipasi serta kurangnya akses informasi mengenai mekanisme yang ada. Hal ini berpotensi menghambat keterlibatan masyarakat dalam pengabilan Keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka.

Meskipun secara normatif mekanisme partisipasi publik telah diatur dan diterapkan oleh DPRD, seperti rapat dengar umum, reses dan forum warga, efektivitas implementasinya di lapangan kerap menjadi tanda tanya. Di banyak daerah termasuk potensi di Kabupaten Bangkalan, partisipasi seringkali masih bersifat seremonial atau informatif, kurang substansial dalam mempengaruhi Keputusan akhir. Tantangan yang sering muncul meliputi rendahnya sosialisasi, keterbatasan akses bagi kelompok rentan, serta kurangnya mekanisme umpan balik yang transparan mengenai tindak lanjut aspirasi. Situasi ini dapat mengakibatkan rendahnya kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif, kebijakan yang kurang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan pada akhirnya menghambat tata kelola terwujudnya pemerintahan yang benar benar inklusif dan akuntabel².

Berdasarkan latar belakang tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi secara komprehensif mekanisme partisipasi publik di DPRD Bangkalan dalam rangka tata kelola pemerintahan yang inklusif dan akuntabel. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana efektivitas mekanisme partisipasi publik yang saat ini diterapkan di DPRD Bangkalan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inklusif dan akuntabel?”

¹ Ulfiyyati, A., Muhamad, R., & Akbari, I. S. (2023). Demokrasi: tinjauan terhadap konsep, tantangan, dan prospek masa depan. *Advances In Social Humanities Research*, 1(4), 435-444.

² Asbanu, N. R., Belo, C. M. F., & Saingo, Y. A. (2025). Analisis Peran DPR dalam Menyuarakan Kepentingan Rakyat Berdasarkan Sila Keempat Pancasila. *Mutiara: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 3(1), 120-134.

EVALUASI KOMPREHANSIF MEKANISME PARTISIPASI PUBLIK DI DPRD KABUPATEN BANGKALAN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG INKLUSIF DAN AKUNTABEL

Dengan demikian penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan memahami dan meningkatkan mekanisme partisipasi publik di DPRD Bangkalan serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan tata kelola pemerintahan di daerah tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan Empiris untuk mengevaluasi secara komprehensif mekanisme partisipasi public di DPRD Bangkalan. Pendekatan empiris dipilih untuk memungkinkan peneliti memahami fenomena yang diteliti melalui observasi dan data nyata di lapangan bukan semata berdasarkan teori atau hipotesis awal. Melalui metode ini fenomena partisipasi publik dapat diamati dan memberikan wawasan yang mendalam mengenai praktik dan tantangan yang dihadapi. Data primer yang dikumpulkan melalui metode wawancara yang dilakukan dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan yang terlibat langsung dalam proses dan kebijakan terkait partisipasi publik sehingga dapat secara strategis menggali perspektif dan aksesibilitas terhadap informasi relevan. Data sekunder digunakan sebagai pelengkap dan pembanding data primer serta untuk memperkaya konteks penelitian, sehingga penelitian ini bertujuan untuk menyajikan evaluasi yang berimbang mengenai mekanisme partisipasi publik di DPRD Bangkalan dan dapat memberikan rekomendasi yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Mekanisme Partisipasi

Dari hasil wawancara terlihat jelas bahwa anggota DPRD Bangkalan memiliki pemahaman yang memadai mengenai esensi partisipasi publik yang secara eksplisit menekankan relevansi dan urgensi pelibatan masyarakat sebagai pilar fundamental dalam kerja legislatif. Perspektif ini mengindikasikan adanya kesadaran internal di lembaga DPRD mengenai peranan krusial masyarakat dalam proses pengambilan Keputusan dan pengawasan pemerintah daerah, sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik yang menempatkan warga sebagai subjek aktif.³

³ Sumarto, H. S. (2025). *Inovasi, partisipasi dan good governance: 20 prakarsa inovatif dan partisipatif di Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

DPRD Bangkalan saat ini mengimplementasikan beberapa mekanisme partisipasi yaitu Reses, *Public Hearing*, dan Kunjunga Daerah. Dari ketiga mekanisme ini Reses diidentifikasi sebagai metode yang paling efektif. Keefektifannya dinilai tinggi karena frekuensi pelaksanaannya yang rutin -tiga kali dalam setahun- memfasilitasi pertemuan langsung antara anggota dewan dan konstituen di daerah pemilihan masing-masing. Kedekatan fisik dan interaksi personal ini dianggap krusial untuk mejaring aspirasi secara otentik. Seperti diungkapkan oleh narasumber “Reses itu adalah wadah utama kami untuk mendengar langsung keluhan dan masukan warga di lapangan kitab isa langsung lihat kondisi mereka”. Hal ini selaras dengan konsep demokrasi perwakilan partisipatif yang menekankan pentingnya kedekatan wakil rakyat dengan pemilih.⁴ (pateman, 1970)

Terkait tindak lanjut aspirasi yang didapat dari reses ini secara spesifik diarahkan untuk pembuatan program oleh masing-masing anggota dewan sesuai dengan hasil yang didapati di daerah pemilihan mereka. Ini menunjukkan orientasi pada implementasi program atau kegiatan konkret di tingkat komstituen

Namun, efektivitas reses ini kontras dengan gambaran mekanisme lain. *Public hearing* digambarkan sebagai forum yang cenderung terbatas pada pihak-pihak yang diundang seperti diutarakan narasumber “kalau *public hearing* itu kan biasanya kita undang yang memang terkait langsung dengan topik pembahsan jadi tidak semua bisa ikut”. Keterbatasan jangkauan ini menunjukkan bahwa *public hearing* kurang inklusif dalam mempresentasikan spektrum suara msyarakat yang lebih luas, berpotensi menjadi ajang partisipasi elite atau kelompok kepentingan tertentu⁵. Brntuk tindak lanjut dari *public hearing* ini secar khusus adalah perumusan peraturan daerah (perda). Demikian pula, kunjungan daerah dinilai kurang efektif karena frekuensinya yang sudah jarang digunakan, mengindikasikan penurunan prioritas atau efisiensi dalam menjaring aspirasi melalui metode ini. Ini menunjukkan bahwa tidak semua mekanisme berfungsi optimal dalam memfasilitasi partisipasi yang merata.

Evaluasi terhadap dimensi inklusivitas mengungkapkan adanya tantangan signifikan yang menghambat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang benar-benar inklusif. Meskipun ada Upaya mendekatkan diri melalui reses, data wawancara menyoroti

⁴ Utami, S. D. (2022). *Persepsi Mahasiswa Bagian Hukum Tata Negara Angkatan 2017 Universitas Jambi Terhadap Kualitas Calon Anggota DPRD Provinsi Jambi Pada Pemilu Tahun 2019* (Doctoral dissertation, Universitas Jambi).

⁵ Alim, M. S. (2024). *Ilmu Politik & Kebijakan Publik*. Mega Press Nusantara.

EVALUASI KOMPREHANSIF MEKANISME PARTISIPASI PUBLIK DI DPRD KABUPATEN BANGKALAN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG INKLUSIF DAN AKUNTABEL

adanya kelompok masyarakat yang kurang terjamah, yaitu petani. Kondisi ini, seperti dijelaskan narasumber, disebabkan oleh kurangnya pemahaman petani terhadap teknologi dan minimnya partisipasi mereka dalam kegiatan reses. Narasumber secara spesifik menyebutkan “petani ini seringkali sulit dijangkau. Mungkin karena sibuk di ladang, atau belum terbiasa dengan teknologi jadi info reses pun kadang tidak sampai atau mereka merasa tidak relevan untuk ikut”.

Fenomena ini mengonfirmasi temuan berbagai penelitian yang menyoroti kesenjangan partisipasi berbasis demografi dan aksesibilitas, termasuk tantangan dalam *e-participation* dan inklusi kelompok rentan⁶. Di wilayah agraris seperti Bangkalan, petani merupakan segmen populasi yang substansial, dan jika suara mereka terpinggirkan, kebijakan yang dihasilkan berisiko tidak relevan dengan kebutuhan riil mereka. Ini bukan sekadar masalah teknis, melainkan isu keadilan sosial dan representasi yang fundamental⁷. Oleh karena itu, ketergantungan pada reses, meskipun efektif dalam beberapa aspek, belum mampu mengatasi hambatan akses dan motivasi yang bervariasi antar kelompok masyarakat. Desain mekanisme yang ada belum sepenuhnya adaptif terhadap karakteristik beragam warga, sehingga menciptakan bias partisipasi yang serius. Tata kelola yang inklusif menuntut adanya upaya proaktif untuk menjangkau dan memberdayakan kelompok-kelompok yang secara tradisional terpinggirkan⁸. Tantangan “efisiensi: yang disebutkan narasumber pun dapat diinterpretasikan sebagai kendala dalam melakukan *outreach* yang lebih intensif kepada kelompok-kelompok rentan ini.

Aspek akuntabilitas dalam mekanisme partisipasi di DPRD Bangkalan juga menghadapi celah penting, terutama terkait transparansi tindak lanjut aspirasi. Meskipun aspirasi diserap dan diarahkan untuk menjadi program atau perda, data wawancara tidak secara eksplisit menunjukkan adanya mekanisme umpan balik yang sistematis dan transparan kepada masyarakat mengenai bagaimana aspirasi mereka diproses, diprioritaskan atau diakomodasi dalam program atau perda tersebut.

⁶ Indra Kristian, S. I. P., & AP, M. (2025). *DINAMIKA KEBIJAKAN PUBLIK: FORMULA, IMPLEMENTASI, DAN EVALUASI*. PT Penerbit Qriset Indonesia.

⁷ Sucipto, D., Sukmana, O., Wahyudi, W., & Nur, N. M. (2024). Penerapan Prinsip-Prinsip Penataan Daerah Pemilihan Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2024. *Jurnal Yustisiabel*, 8(2), 232-252

⁸ Tamba, W. P., Hartanto, M. F. B., & Putri, P. Y. (2024). Pancasila sebagai Dasar Kebijakan Kesejahteraan Sosial di Indonesia. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 4(2), 146-162.

Ini adalah celah kritis yang perlu dicermati. Akuntabilitas publik menuntut lebih dari sekadar penyerapan aspirasi dan penentuan bentuk tindak lanjut, ia juga memerlukan responsivitas dan pertanggungjawaba yang jelas dari pihak DPRD kepada masyarakat terkait hasil dari aspirasi mereka⁹. Jika masyarakat tidak mengetahui bagaimana aspirasi mereka berkontribusi pada program atau perda, apakah dipertimbangkan atau mengapa tidak diakomodasikan hal ini dapat membuat masyarakat bisa merasa partisipasinya tidak berarti, yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya partisipasi di masa mendatang. Oleh karena itu, walaupun kedua mekanisme memiliki bentuk tindak lanjut yang jelas, kualitas akuntabilitasnya msih dipertanyakan tanpa adanya mekanisme umpan balik yang transparan dan sistematis. Ini menunjukkan bahwa partisipasi berisiko menjadi sekadar formalitas jika tidak diimbani dengan pertanggungjawaban yang jelas atas hasil proses tersebut¹⁰.

Secara keseluruhan analisis ini menggarisbawahi bahwa meskipun DPRD Bangkalan menunjukkan niat baik dan kesadaran akan pentingnya partisipasi publik, terdapat kesenjangan signifikan antara niat tersebut dan implemementasi yang inklusif serta akuntabel, ketergantungan utama pada reses meskipun efektif dalam penyerapan langsung dan memiliki tindak lanjut berupa program terbukti tidak cukup untuk menjamin inklusivitas penuh, terutama dalam menjangkau kelompok petani yang esensial namun terpinggirkan. Isu ini bukan hanya masalah teknis tetapi juga fundamental bagi keadilan sosial dan representasi yang merata di daerah agraris.

Lebih lanjut ketidakjelasan mekanisme akuntabilitas terkait umpan balik atas tindak lanjut aspirasi baik dalam bentuk program dari reses maupun perda dari *public hearing* merupakan *redflag* utama. Partisipasi tanpa transparansi mengenai bagaimana masukan diproses dan dipertanggungjawabkan berisiko menjadi “mendengar tanpa bertindak” yang pada akhirnya akan mnegikis kepercayaan publik dan menghasilkan apatisme. Pernyataan naraumber engenai “tantangan efisiensi” mungkin saha merupakan kendala riil namun penting untuk memastikan bahwa efisiensi tidak mengorbankan kualitas inklusivitas dan akuntabilits. Tata kelola yang baik menuntut inovasi agar kedua aspek ini dapat tercapai secara simultan.

⁹ Epriadi, D., Sos, S., Mardansyah, S., & Padrisan Jamba, S. H. M. H. (2023). *Kebijakan Publik di Indonesia: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Edu Publisher.

¹⁰ Ismoyo, J. D., Apriyanto, A., Harryanti, T., & Judijanto, L. (2025). *Teori Negara Hukum Modern*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

EVALUASI KOMPREHANSIF MEKANISME PARTISIPASI PUBLIK DI DPRD KABUPATEN BANGKALAN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG INKLUSIF DAN AKUNTABEL

Dengan demikian, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang benar benar inklusif dan akuntabel di Kabupaten bangkalan, DPRD perlu secara proaktif mengatasi celah-celah ini. Fokus harus diberikan pada diversifikasi metode partisipasi yang lebih adaptif untuk menjangkau semua segmen masyarakat, serta pengembangan sistem umpan balik yang transparan dan sistematis guna memastikan akuntabilitas penuh atas hasil dari aspirasi yang telah diserap, baik itu berupa program maupun peraturan daerah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa DPRD Bngkalan memiliki kesadaran tinggi akan pentingnya partisipasi publik dan telah mengimplementasikan mekanisme seperti Reses, *Public Hearing* dan Kunjungan daerah. Reses terbukti menjadi metode paling efektif untuk penyerapan aspirasi yang ditindaklanjuti dengan program sementara *public hearing* berfokus pada perda namun, teridentifikasi celah signifikan dalam inklusivitas dan akuntabilitas.

Inklusivitas masih menjadi tantangan besar, terutama dalam menjangkau kelompok petani yang terpinggirkan akibat keterbatasan teknologi dan kurangnya partisipasi dalam reses, ini menimbulkan risiko kebijakan yang tidak relevan dengan kebutuhan riil Masyarakat.

Adapun akuntabilitas masih perlu diperkuat karena tidak adanya mekanisme umpan balik yang transparan dan sistematis mengenai bagaimana aspirasi diproses dan ditindaklanjuti menjadi program atau perda. Hal ini mengikis kepercayaan publik dan menyebabkan apaisme.

Dengan demikian untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang benar benar inklusif dan akuntabel DPRD Bangkalan perlu diversifikasi metode partisipasi yang lebih adaptif untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat, serta mengembangkan sistem umpan balik yang transparan dan akuntabel terkait hasil aspirasi.

Saran

1. DPRD dapat berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan lembaga Pendidikan untuk menyelenggarakan program edukasi tentang pentingnya partisipasi, mekanisme

- yang tersedia serta literasi digital dasar, khususnya bagi kelompok yang belum terbiasa dengan teknologi.
2. DPRD perlu melakukan analisis mendalam secara berkala terhadap tren aspirasi untuk mengidentifikasi isu-isu prioritas yang konsisten.
 3. Publikasi laporan berkala yang ringkas dan mudah diakses mengenai rekapitulasi aspirasi yang diterima dan status tindak lanjutnya yang sangat esensial untuk akuntabilitas.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Alim, M. S. (2024). *Ilmu Politik & Kebijakan Publik*. Mega Press Nusantara
- Efendi, Jonaedi dan Johny Ibrahim, *Metode penelitian hukum: normatif dan empiris*. Jakarta: Prenada Media 2018
- Epriadi, D., Sos, S., Mardansyah, S., & Padrisan Jamba, S. H. M. H. (2023). *Kebijakan Publik di Indonesia: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Edu Publisher.
- Indra Kristian, S. I. P., & AP, M. (2025). *DINAMIKA KEBIJAKAN PUBLIK: FORMULA, IMPLEMENTASI, DAN EVALUASI*. PT Penerbit Qriset Indonesia.
- Ismoyo, J. D., Apriyanto, A., Harryanti, T., & Judijanto, L. (2025). *Teori Negara Hukum Modern*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Sumarto, H. S. (2025). *Inovasi, partisipasi dan good governance: 20 prakarsa inovatif dan partisipatif di Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Artikel

- Asbanu, N. R., Belo, C. M. F., & Saingo, Y. A. (2025). Analisis Peran DPR dalam Menyuarakan Kepentingan Rakyat Berdasarkan Sila Keempat Pancasila. *Mutiara: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 3(1), 120-134.
- Sari, R. (2022). "Mekanisme Partisipasi Publik dalam Pengambilan Keputusan di Pemerintahan Daerah." *Jurnal Administrasi Publik*, 15(2), 123-135
- Sucipto, D., Sukmana, O., Wahyudi, W., & Nur, N. M. (2024). Penerapan Prinsip-Prinsip Penataan Daerah Pemilihan Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2024. *Jurnal Yustisiabel*, 8(2), 232-252

**EVALUASI KOMPREHANSIF MEKANISME PARTISIPASI
PUBLIK DI DPRD KABUPATEN BANGKALAN DALAM RANGKA
MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG
INKLUSIF DAN AKUNTABEL**

- Tamba, W. P., Hartanto, M. F. B., & Putri, P. Y. (2024). Pancasila sebagai Dasar Kebijakan Kesejahteraan Sosial di Indonesia. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 4(2), 146-162.
- Ulfiyyati, A., Muhamad, R., & Akbari, I. S. (2023). Demokrasi: tinjauan terhadap konsep, tantangan, dan prospek masa depan. *Advances In Social Humanities Research*, 1(4), 435-444.
- Utami, S. D. (2022). *Persepsi Mahasiswa Bagian Hukum Tata Negara Angkatan 2017 Universitas Jambi Terhadap Kualitas Calon Anggota DPRD Provinsi Jambi Pada Pemilu Tahun 2019* (Doctoral dissertation, Universitas Jambi).
- Wibowo, S. (2023). "Tata Kelola Pemerintahan Inklusif: Tantangan dan Peluang." *Jurnal Kebijakan Publik*, 8(3), 200-215.